DAMPAK BIAS DATA TERHADAP PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

Sabanita Tiara Ahmad
NPP. 33.1005
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: tiarasbnta@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Sudarmono, S.STP., M.Si., Ph.D.
Email: sudarmono@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The author focuses on the issue of data inaccuracy in the distribution of social assistance, which affects the effectiveness of the Family Hope Program (PKH).* ***Purpose:*** *The purpose of this study is to identify the causes of data bias by recipients of the Family Hope Program in Gorontalo City.* ***Method:*** *This research uses a qualitative approach method with an evaluative study type according to Lincoln's Theory (2011). Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews (10 informants), and documentation.* ***Result:*** *Research findings indicate that the impact of data bias on the distribution of the Family Hope Program varies across each dimension. In the social problem control dimension, the focus is on the indicator of the error rate in targeting, where KPM data collection has been carried out according to procedures, but supervision, data updates, operational support, and cooperation from all parties are still needed. Meanwhile, in the Meeting Needs dimension, PKH facilitators still often face difficulties such as technical problems, limited time, and uncooperative attitudes from some beneficiaries; however, PKH facilitators continue to work hard to ensure that KPM needs are met. As for the Providing Opportunities for Advancement dimension, many poor families who are not registered in the social assistance distribution lose their initial capital. In other words, data bias hinders the creation of 'opportunities for advancement' for both ineligible recipients as well as eligible but overlooked recipients.* ***Conclusion:*** *This research concludes that the implementation of the Family Hope Program in Gorontalo City has been running well, but it is still not optimal. The recommendation of this research is that improvements in the data system and the enhancement of human resources are the main keys in ensuring that the Family Hope Program can function optimally as a fair, targeted, and sustainable social welfare instrument in Gorontalo City.*
Keywords: *Data Bias; Exclusion Errors; Inclusion Errors; Social Welfare; Family Hope Program.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan ketidakakuratan data dalam penyaluran bantuan social yang mempengaruhi efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya bias data oleh penerima Program Keluarga Harapan di Kota Gorontalo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi evaluatif menurut Teori Lincoln (2011). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (10 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak dari bias data pada penyaluran Program Keluarga Harapan bervariasi setiap dimensinya. Pada dimensi pengendalian masalah sosial berfokus pada indikator tingkat kesalahan penargetan, di mana pendataan KPM sudah di jalankan sesuai dengan prosedur, namun masih diperlukannya pengawasan, pembaharuan data, dukungan operasional, serta kerja sama dari semua pihak. Sementara itu, pada dimensi Memenuhi Kebutuhan, pendamping PKH masih sering mengalami kesulitan seperti masalah teknis, waktu yang sempit, dan sikap tidak kooperatif dari beberapa penerima manfaat, akan tetapi pendamping PKH terus bekerja keras untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan KPM. Adapun pada dimensi Memberikan Kesempatan untuk maju, masih banyak keluarga miskin yang tidak tercatat dalam penyaluran bantuan sosial kehilangan modal awal, dengan kata lain bias data menghambat terciptanya ”kesempatan untuk maju” baik bagi penerima tidak layak maupun layak tapi terabaikan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyaluran Program Keluarga Harapan di Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih belum optimal. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya perbaikan sistem data dan peningkatan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam memastikan PKH dapat berfungsi optimal sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Kota Gorontalo.

Kata kunci: Bias Data; *Exclusion Error*; *Inclusion Error*; Kesejahteraan Sosial; Program Keluarga Harapan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini didasari oleh pentingnya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudarmono (2021), pembangunan inklusif merupakan pendekatan efektif untuk mereduksi dampak pembangunan yang hanya berpihak pada kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan akses terhadap layanan sosial, tetapi juga dengan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik (Haliim et al., 2024). Ketimpangan sosial-ekonomi tetap menjadi persoalan struktural di Indonesia meskipun pertumbuhan ekonomi berlanjut (Meirien et al., 2025). Menurut Suryadi et al., (2020) kemiskinan dan ketidakmerataan merupakan permasalahan fundamental dalam kesejahteraan pembangunan nasional yang hingga kini masih menjadi fokus utama pemerintah, termasuk tingkat daerah. Menurut Martini (2017), penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga diterapkan ke dalam jenjang yang lebih terperinci melalui pemerintah daerah. Lebih lanjut, pemerintahan merupakan elemen yang tak terpisahkan dari relasi antara warga negara dan negara, yang dijalankan dengan memanfaatkan sistem organisasi serta tata kelola pemerintahan. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Gorontalo tahun 2024 dan 2025, seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan angka kemiskinan, dengan penurunan tertinggi secara absolut terjadi di Kabupaten Gorontalo (dari 61,91 ribu menjadi 56,13 ribu jiwa), sementara Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi mencatatkan jumlah penduduk miskin paling kecil dan turun dari 12,97 ribu jiwa menjadi 12,12 ribu jiwa. Sehingga

hal ini memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah Kota Gorontalo dalam menurunkan kemiskinan di kota Gorontalo.

Penelitian tentang pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial telah dilakukan dan memberikan berbagai perspektif tentang efektivitas program-program tersebut. Salah satu program yang sering dianalisis dalam konteks pengentasan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Indonesia. Realitas budaya kemiskinan yang berkembang dalam kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH meliputi ketergantungan pada bantuan sosial PKH, kebiasaan berutang, mengandalkan bantuan dari anak, istri sebagai penopang utama ekonomi keluarga, serta pola pikir yang menerima kemiskinan sebagai takdir ("Preface: The 2nd International Conference of Mathematics Education, Learning, and Application," 2024). PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin (Noegroho et al., 2024). Menurut Widyanti & Lestari (2020) dalam (Yulianti et al., 2024) sejauh mana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mencapai sasarannya masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan peneliti. Namun demikian, bukti dari berbagai studi menunjukkan bahwa PKH berhasil memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, di mana rumah tangga penerima manfaat memperlihatkan peningkatan konsumsi dan penurunan tingkat kemiskinan dalam ukuran relatif. Qoyum (2025) mengungkapkan efektivitas mereka dalam memenuhi kebutuhan mendesak dan meningkatkan kesejahteraan

Di Kota Gorontalo, program ini telah diimplementasikan sejak tahun 2007 dan kini bertransformasi dari bantuan tunai menjadi non-tunai bersyarat. Berdasarkan Dinas Sosial Kota Gorontalo Indeks Bantuan Sosial PKH 2025 ini merinci besaran bantuan tahunan untuk delapan kategori penerima. Mulai dari ibu hamil, anak usia 0-6 tahun (masing-masing Rp.3.000.000), anak SD (Rp.900.000), SMP (Rp.1.500.000), SMA (Rp.2.000.000), disabilitas berat dan lansia $\geq$60 tahun (masing-masing Rp.2.400.000), hingga korban HAM berat (Rp.10.800.000) yang dapat di cairkan secara bulanan, dua bulanan, atau tiga bulanan sesuai indeks yang tercantum. Program ini menyasar pada keluarga prasejahtera dan kelompok rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sistem data bantuan sosial di Indonesia sebagai basis data utama pemerintah yang selama ini di gunakan sebagai acuan dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial. Namun, sistem ini bersifat statis dan pembaruannya yang cukup lambat, sehingga mengakibatkan berbagai masalah pada penyaluran bantuan sosial, seperti data yang tidak akurat, penerima bantuan yang seharusnya tidak layak namun masih tercatat, dan tumpang tindihnya data. DTKS ini hanya memuat data sosial tanpa memasukkan data ekonomi dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kebutuhan bantuan, sehingga penyaluran bantuan sosial belum benar-benar tepat sasaran dan kurang efektif. Pelaksanaan kebijakan tersebut pada kenyataannya menimbulkan beberapa masalah dalam Masyarakat (Sri & Rutiana, 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistikan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo tahun 2024 dan 2025, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan jumlah penerima secara signifikan. Total penerima PKH meningkat dari 5.018 orang pada tahun 2024 menjadi 7.454 orang pada tahun 2025, atau bertambah sebanyak 2.436 penerima (sekitar 48,5%). Hal ini menunjukkan adanya perluasan cakupan program di seluruh kecamatan. Secara umum, data ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam memperluas jangkauan Program Keluarga Harapan sebagai percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, masih diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai ketepatan sasaran, terutama di kecamatan dengan jumlah penerima tertinggi (Kota Barat) agar intervensi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses layanan dan dapat dioptimalkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Menurut Br sembiring (2024) korelasi antara bantuan sosial dan kemakmuran ekonomi secara signifikan bergantung pada ketepatan data yang terkandung dalam Sistem Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS). Terdapat tiga masalah utama dalam penyaluran PKH di Kota Gorontalo pasca pandemi: 1) penyaluran tidak serentak akibat lambatnya proses pemadanan data sosial dengan data kependudukan, 2) ketidakmutakhiran DTKS yang menyebabkan inklusi penerima yang sudah meninggal, pindah, atau tidak memenuhi syarat, 3) birokrasi perbankan yang rumit untuk pencairan dana oleh ahli waris, yang mengharuskan proses sekali cair dengan persyaratan dokumen yang ketat (Natsir et al., 2025).

Terhitung sejak Tahun 2025, pemerintah secara resmi memberlakukan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan adanya peralihan sistem dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) diharapkan mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial terutama penyaluran Program Keluarga Harapan di Kota Gorontalo yang lebih adil, efisien dan transparan. Namun demikian, keberhasilan sistem ini juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam memestikan data yang tercatat tetap lengkap dan akurat. Martini (2017) menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga diimplementasikan ke dalam struktur yang lebih konkret melalui pemerintahan daerah. Pemerintahan merupakan elemen fundamental dalam hubungan antara individu dan negara, yang dijalankan melalui sistem organisasi serta mekanisme manajemen pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo mencerminkan bagaimana kebijakan sosial yang dirancang di tingkat nasional (seperti penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional/DTSEN) harus dioperasionalkan oleh pemerintah daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan dampak bias data terhadap penyaluran program keluarga harapan, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima PKH di tingkat kelurahan/kecamatan. Fenomena ini menjadi menarik di teliti lebih dalam karena dalam pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan di Kota Gorontalo masih belum tepat sasaran.

Terdapt tiga permasalahan utama dalam penyaluran Program Keluarga Harapan di Kota Gorontalo pasca pandemi: 1) penyaluran tidak serentak akibat lambatnya proses pemadanan data sosial dengan data kependudukan, 2) ketidakmutakhiran DTKS yang menyebabkan inklusi penerima yang sudah meninggal, pindah, atau tidak memenuhi syarat, 3) birokrasi perbankan yang rumit untuk pencairan dana oleh ahli waris, yang mengharuskan proses sekali cair dangan persyaratan dokuemen yang ketat (Natsir et al., 2025). Mengutip juga dalam berita Kota Gorontalo yang di tulis oleh Alex pada tahun 2023 dengan judul ”DTKS Kota Gorontalo Harus Diperbaiki Secara Kontinu”, penyaluran bantuan sosial di Kota Gorontalo mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD, Muksin Brekat. Sorotan ini didasari oleh banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketidaktepatan sasaran ini terlihat dari fenomena di mana masyarakat prasejahtera yang berhak justru terhapus dari daftar, sementara warga yang sudah tergolong mapan malah masih tercatat sebagai penerima manfaat. Menyikapi ketimpangan data tersebut, mutlak diperlukan upaya perbaikan dan validasi data secara berkesinambungan berdasarkan kondisi riil di lapangan, yang tentunya menuntut sinergi kuat antara instansi pemerintahan pusat dan daerah. Keberhasilan suatu sistem pemerintahan daerah sangat bergantung pada kualitas sistem informasinya. Informasi yang akurat, terkini, dan

terintegrasi merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang tepat (Raharjo, Labolo & Djohan, 2022: 371).

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi keilmuan untuk mengisi celah teoritis hubungan antara bias data dan tiga dimensi kesejahteraan sosial Midgley, urgensi pemecahan masalah untuk menghentikan siklus *inclusion error* dan *exclusion error* yang merugikan negara dan masyarakat miskin, serta urgensi praktis bagi Pemerintah Kota Gorontalo dan Dinas Sosial sebagai lokus penelitian untuk memperbaiki sistem verifikasi data, mendukung transisi DTKS ke DTSEN pasca-2025, dan menjadikan PKH sebagai perlindungan sosial yang benar-benar tepat sasaran.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks bias data maupun mengenai penyaluran Program Keluarga Harapan. Penelitian Tatu Sius, Yasinta Y. Palan Peten, Kresensia Vemmilia Raju, Hendrikus L Kaha, dan Frans Nyong yang berjudul *Public Trust:* Dampak *Exclusion* dan *Inclusion Error* Data Program Keluarga Harapan dari hasil penelitian ini tidak membahas metodologi khusus yang digunakan untuk pengumpulan dan pembaruan data dalam data DTKS, sehingga meninggalkan celah dalam memahami bagaiman proses ini dapat di tingkatkan (Tatu Sius et al., 2024). Penelitian Alnamira yang berjudul Efektivitas Program (Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun data penerima mengacu pada ketepatan pusat, realisasi di lapangan di nilai belum tepat sasaran (Alnamira, 2022). Penelitian Listy dan Mirzaya Putra yang berjudul Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan keluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dengan hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat penurunan kepersetaan PKH di Kelurahan Kerasaan 1 menunjukkan pola yang tidak stabil setiap tahunnya. Pada periode sebelum PKH dipublikasikan, tidak ditemukan adanya pengakuan ketidakmampuan dari masyarakat. Sebaliknya, setelah program ini diumumkan secara luas, muncul indikasi bahwa sebagian besar penerima manfaat adalah masyarakat yang sesungguhnya mampu (Listy & lham Mirzaya Putra, 2024).

Penelitian Siswati Saragi, Maria Ulfa Batoebara, dan Nur Ambia Arma yang judul penelitian Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak dengan hasil penelitian Penilaian kelayakan peserta PKH di Desa Kota Rantang menunjukkan adanya ambivalensi. Berdasarkan kriteria kondisi fisik rumah, para peserta tidak lagi memenuhi syarat sebagai keluarga miskin karena telah memiliki hunian yang layak. Sebaliknya, berdasarkan kriteria pendapatan keluarga, mereka masih layak mendapatkan bantuan PKH, terutama selama periode pandemi yang berdampak pada tingginya angka kehilangan pekerjaan di Masyarakat (Saragi et al., 2021). Penelitian Syahrial dan Desrina dengan judul penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman) Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, secara umum menunjukkan kinerja yang positif. Seluruh rangkaian proses meliputi sosialisasi awal, pelaksanaan program, monitoring, serta kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dijalankan sesuai mekanisme. Meskipun demikian, realisasi di tingkat lapangan belum mencapai tingkat optimal karena masih terdapat masalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan PKH (Syahrial & Desrina, 2022). Penelitian Vivi Oktarina, Nina Karlina, dan Candradewini judul penelitian Evaluasi Konteks Program Keluarga Harapan (PKH)

di Kecamatan Tanah Datar penelitian ini menyoroti bahwa ketidakakuratan data dari DTKS menghambat penargetan efektif penerima manfaat PKH di Padang Ganting, yang menyebabkan keluarga miskin yang tidak terdaftar kehilangan dukungan, sehingga berdampak pada efektivitas keseluruhan program sebagai instrumen kesejahteraan social (Oktarina et al., 2022).

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana fokus penelitian yang dilakukan mengenai dampak bias data terhadap penyaluran Program Keluarga Harapan sebagai instrumen kesejahteraan sosial pada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Gorontalo. Pada penelitian-penelitian sebelumnya contohnya pada kerangka teori penelitian menurut Tatu Sius et al., (2024) penelitian ini tidak memiliki kerangka teoritis yang menghubungkan bias data dengan tujuan kesejahteraan sosial, sedangkan penelitian ini secara teoretis membuktikan bahwa bias data menggagalkan tiga pilar fundamental kesejahteraan menurut Midgley. Penelitian menurut Syahrial & Desrina (2022) dalam penelitian ini dalam metodenya menggunakan deskriptif kualitatif dengan hanya berfokus pada implementasi progeam sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluatif kualitatif dengan analisis data menggunakan model Miles & Huberman dan triangulasi sumber data dari 10 informan yang dipilih melalui *purposive* dan *snowball sampling*.

Penelitian menurut Oktarina, Karlina & Candradewini (2022) dalam kebijakannya hanya merujuk pada system DTKS yang lama sedangkan dalam penelitian ini mengevaluasi transisi kebijakan dari DTKS ke DTSEN berdasarkan regulasi terbaru (Permensos No. 3 Tahun 2025) sehingga kebijakannua lebih baru. Penelitian Yunus et al., (2022) karakteristik objeknya Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu (Sulawesi Tengah) sedangkan penelitian ini di Kota Gorontalo dengan 9 kecamatan, 50 kelurahan, dan karakteristik urban dengan kepadatan 2.573 jiwa/km². Penelitian Listy & Ilham Mirzaya Putra (2024) memiliki temuan utama yaitu tingkat penurunan peserta PKH menunjukkan pola tidak stabil; sebagian besar penerima manfaat adalah masyarakat yang sesungguhnya mampu (inclusion error) sedangkan untuk penelitian ini temuan utamanya yaitu menemukan bahwa bias data menciptakan dua kesalahan penargetan (inclusion dan exclusion error) secara sistemik, dengan identifikasi 5 faktor penghambat yang saling terkait dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data di tingkat kelurahan/kecamatan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya bias data oleh penerima Program Keluarga Harapan di Kota Gorontalo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi evaluatif. Merujuk pada Denzin dan Lincoln (2011), penelitian kualitatif merupakan sebuah metodologi yang menawarkan instrumen bagi peneliti untuk menggali dan memahami makna terdalam dari berbagai fenomena yang kompleks, sekaligus menelaah dinamika dalam tataran praktis. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi dampak bias data terhadap penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data deskriptif dari narasumber yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-pasrtisipasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan 10 informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan kunci terdiri dari Kepala Bidang Rehabilitas dan Jaminan Sosial, Koordinator Pendamping PKH, Pendamping PKH (2 orang), serta Keluarga Penerima Manfaat (6 orang) di Kota Gorontalo (Simangungsong, 2016). Berdasarkan pendapat Nasution (2023), teknik purposive sampling dalah metode pemilihan sampel non-acak dimana peneliti secara sadar dan sengaja menyeleksi subjek berdasarkan kriteria spesifik yang telah dipilih secara kebetulan melainkan disesuaikan secara persisi dengan kebutuhan studi. Sementara, teknik snowball sampling merupakan metode pengambilan sampel berantai atau bertahap yang dimulai dari jumlah informan terbatas kemudian meluas seiring berjalannya penelitian.

Keabsahan data kulitatif diuji melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas sendiri dijaga dengan triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pemerintah, koordinator, pendamping, dan penerima), triangulasi teknik (membandingkan wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta *member check* kepada informan untuk memastikan kesesuain data dengan realitas di lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif pendekatan yang digunakan bersifat induktif, di mana prosesnya berawal dari fakta-fakta empiris di lapangan dan bukan di mulai dari teori yang sudah ada. Menurut Miles dan Huberman (1984) proses analisis data dilaksanakan dengan langkah-langkah yang bersifat interaktif dan berkelanjutan yaitu pengumpulan data (bersumber dari observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi), reduksi data (kegiatan menyeleksi, merangkum, memfokuskan perhatian pada substansi informasi, serta mengidentifikasi tema dan pola), penyajian data (berfokus pada interpretasi dan penyusunan informasi dari penuturan informan terkait fokus studi), dan penarikan kesimpulan (data yang relevan dianalisis dan diinterpretasi untuk memberikan verifikasi teoritis yang kuat terhadap hasil penelitian). Analisis data menggunakan kerangka Kesejahteraan Sosial dari James Midgley mengendalikan masalah sosial (*social problems are managed*), memenuhi kebutuhan (*needs are met*), dan memberikan kesempatan untuk maju (*opportunities for advancement are provided*) (Rusmana & Jumadila, 2023).

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Januari hingga April 2026, yang mencakup proses observasi awal, pelaksanaan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan program. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi dampak dari bias data terhadap penyaluran Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis pemerintah Indonesia dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan melalui pendekatan *conditional cash transfers*. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat pemerintah yang dirancang untuk menekan angka kemiskinan dengan menyasar keluarga kurang mampu

Penulis menganalisis dampak bias data terhadap penyaluran Program Keluarga Harapan sebagai instrumen kesejahteraan sosial pada Kelurga Penerima Manfaat di Kota Gorontali Provinsi Gorontalo menggunakan teori Kesejahteraan Sosial dari Midgley yang mencakup tiga dimensi mengendalikan masalah sosial (*social problems are managed*), memenuhi kebutuhan (*needs are met*), dan memberikan kesempatan untuk maju (*opportunities for advancement are provided*) (Rusmana & Jumadila, 2023). Ketiga dimensi ini saling terkait dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bergantung ketersediaan dan ketepatan data kependudukan yang rinci.

3.1. Mengendalikan Masalah Sosial (*Social Problems are Managed*)

Dimensi mengendalikan masalah sosial ini berfokus pada indikator Tingkat Kesalahan Penargetan (*Targeting error).* Dalam proses verifikasi dan validasi data yang menjadi dasar PKH belum optimal. Kendala utama terletak pada tingkat kelurahan/kecamatan, di mana pembaharuan data tergantung pada laporan warga dan kapasitas aparatur. Ketidakakuratan data DTSEN menyebabkan program PKH gagal mengendalikan masalah sosial dasar yang menjadi targetnya, yaitu ketidakadilan dan eksklusi. *Inclusion error* menyebabkan pemborosan anggaran dan distorsi tujuan program, sementara *exclusion error* justru mengabaikan kelompok yang paling rentan, sehingga berpotensi memperdalam jurang kemiskinan dan ketimpangan.

Hasil

Di Kota Gorontalo proses pendataan KPM sudah di jalankan sesuai dengan prosedur. Namun, masih diperlukannya pengawasan, pembaruan data secara rutin, dukungan operasional untuk pendamping PKH, serta kerja sama dari semua pihak agar bantuan sosial tepat sasaran dan masalah sosial bisa dikendalikan.

3.2. Memenuhi Kebutuhan (*Needs are Met*)

Dalam dimensi memenuhi kebutuhan ini berhubungan dengan indikator ketercukupan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat yang tepat sasaran yaitu sejauh mana dampak bias data terhadap bantuan Program Keluarga Harapan ini dalam pemenuhan kebutuhan dasar material dan layanan dasar Keluarga Penerima Manfaat. Nilai bantuan PKH yang bervariasi dinilai oleh sebagian Keluarga Penerima Manfaat dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok jangka pendek, terutama di tengah tekanan ekonomi. Namun, besaran ini belum tentu memadai untuk secara signifikan mengangkat status kesejahteraan keluarga, terlebih jika terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran. Ketika terjadi *exclusion error*, keluarga miskin yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak menerima apa-apa, sehingga kebutuhan dasar mereka akan pangan, pendidikan, dan kesehatan menjadi semakin sulit terpenuhi. Sebaliknya, *inclusion error* mengalihkan sumber daya yang terbatas kepada keluarga yang relatif tidak membutuhkan, sehingga mengurangi dampak agregat program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin Kota Gorontalo secara keseluruhan.

Hasil

Pendamping PKH terus bekerja keras untuk memastikan bahwa terpenuhinya kebutuhan KPM dengan bantuan PKH yang diberikan serta terus melaporkan pembaharuan data secara berkala. Namun, para pendamping PKH masih sering terjadi terkendala masalah teknis, waktu sempit, dan sikap tidak kooperatif dari beberapa penerima manfaat.

3.3. Memberikan Kesempatan Untuk Maju (*Opportunities for Advancement are Provided*)

Dalam dimensi memberikan kesempatan untuk maju, bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan dirancang untuk mendorong Keluarga Penerima Manfaat memenuhi syarat kesehatan dan pendidikan. Secara teori, ini dapat membuka kesempatan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa yang tidak seberuntung anak lainnya. Namun, penelitian ini menemukan bahwa bias data mengganggu logika tersebut. Keluarga yang sebenarnya membutuhkan dorongan untuk akses layanan dasar justru tidak masuk dalam sistem. Program Keluarga Harapan yang disalurkan kepada penerima yang tidak tepat (*inclusion error*) berisiko menciptakan ketergantungan tanpa dampak pemberdayaan yang berarti. Memperluas definisi pemberdayaan, Suaib dan Zulhijjah (2024) menyatakan bahwa pemberdayaan dalam konteks pembangunan dapat diartikan sebagai upaya menjadikan masyarakat berdaya, memiliki kemampuan atau kekuatan, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan melalui Program

Keluarga Harapan (PKH) seharusnya tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan tunai bersyarat, tetapi juga mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mandiri dan keluar dari kemiskinan. Namun, adanya bias data (seperti *inclusion error* dan *exclusion error*) justru menghambat proses pemberdayaan tersebut.

Di sisi lain, keluarga miskin yang tidak tercatat kehilangan modal awal yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha kecil atau investasi dalam sumber daya manusia. Dengan kata lain, bias data menghambat terciptanya "kesempatan untuk maju" baik bagi penerima yang tidak layak maupun yang layak tapi terabaikan. Keberadaan pendamping PKH di tiap kecamatan seharusnya menjadi motor pemberdayaan. Namun, beban kerja pendamping menjadi tidak optimal jika dihabiskan untuk mengurusi masalah data yang tidak akurat, alih-alih melakukan pendampingan substantif untuk peningkatan kapasitas Keluarga Penerima Manfaat.

Hasil

Jika data akurat dan semua pihak bekerja sama, pendamping PKH bisa beralih dari sekedar mengawasi syarat administrasi menuju pendampingan yang memberdayakan. Mereka bisa membantu KPM mengembangkan usaha, mendapat pelatihan, atau meraih beasiswa. Dengan adanya partisipasi dari warga dalam musyawarah tidak hanya dapat memastikan bantuan tepat sasaran tetapi dapat membuat KPM menjadi lebih mandiri.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa bias data yang terjadi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo bukanlah fenomena administratif yang bersifat insidental, melainkan konsekuensi sistemik yang bersumber dari inersia pembaruan basis data serta disinkronisasi antara kebijakan administratif berbasis data (DTKS/DTSEN) dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat yang dinamis di tingkat lokal. Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan Teori Kesejahteraan Sosial James Midgley sebagai pisau analisis, yang secara teoretis membuktikan bahwa bias data tidak hanya menyebabkan kesalahan prosedural, tetapi secara simultan menggagalkan tiga pilar fundamental kesejahteraan: pengendalian masalah sosial yaitu melalui *inclusion* dan *exclusion error*, pemenuhan kebutuhan dasar (akses pangan, kesehatan, dan pendidikan yang terhambat), serta pemberian kesempatan untuk maju (hilangnya modal awal bagi keluarga miskin untuk berdaya dan keluar dari kemiskinan). Perbedaan teoretis ini menjadikan penelitian ini tidak sekadar mengukur efektivitas program seperti penelitian Syahrial & Desrina (2022), Yunus et al. (2022), dan Alnamira (2022) yang hanya berorientasi pada kepatuhan prosedur dan capaian outputmelainkan menempatkan akurasi data sebagai prasyarat mutlak (*sine qua non*) bagi terwujudnya pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan cita-cita Midgley tentang kesejahteraan sebagai proses transformatif, bukan sekadar transfer bantuan pasif.

Selaras dengan temuan Annisa et al. (2023) di Kabupaten Aceh, penelitian ini mengonfirmasi bahwa permasalahan data di tingkat desa/kelurahan menjadi salah satu penghambat utama efektivitas PKH, terutama karena lemahnya sinkronisasi antara SIKS-NG, data kependudukan, dan Dapodik. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengidentifikasi secara komprehensif lima faktor penghambat yang saling terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kendala teknis dan infrastruktur (termasuk konektivitas internet dan perangkat usang), prosedur birokrasi yang rumit dan tidak terintegrasi, rendahnya partisipasi proaktif masyarakat, serta keterbatasan anggaran operasional di lapangan yang belum pernah diungkap secara simultan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya menyebutkan satu atau dua faktor secara terpisah. Di sisi lain, temuan ini juga memperkuat argumentasi Oktarina et al. (2022) dan Arlina et al., (2021) bahwa penggunaan data lama (DTKS) menyebabkan keluarga miskin yang secara objektif memenuhi syarat justru terabaikan (*exclusion error*) dan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang seharusnya menjadi hak mereka,

sehingga memperdalam jurang ketimpangan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam kesejahteraan menurut Midgley. Namun, penelitian ini menambahkan bukti empiris baru bahwa lonjakan penerima PKH hingga 48,5% (dari 5.018 menjadi 7.454 penerima pada tahun 2025) justru memperparah bias data karena sistem tidak siap mengelola volume pembaruan data yang masif di tengah transisi kebijakan, sehingga menciptakan beban ganda bagi pendamping dan operator di tingkat kecamatan.

Kebaruan lain yang membedakan penelitian ini dari sepuluh penelitian terdahulu adalah aspek kebijakan dan periodisasi. Penelitian ini adalah salah satu yang pertama yang secara spesifik mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan potret kritis tentang kesiapan dan hambatan implementasi DTSEN di Kota Gorontalo, tetapi juga menjadi evaluasi awal yang sangat relevan bagi pengambil kebijakan di masa transisi. Temuan-temuan orisinal ini yaitu (1) dampak sistematik bias data terhadap tiga dimensi kesejahteraan Midgley secara simultan, (2) identifikasi lima faktor penghambat verifikasi data secara terstruktur, dan (3) evaluasi transisi kebijakan DTKS ke DTSEN pasca 2025 merupakan kontribusi nyata penelitian ini terhadap pengayaan khazanah keilmuan administrasi publik dan kebijakan sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa tanpa akurasi data yang didukung oleh kapasitas SDM, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat yang memadai, PKH kehilangan esensinya sebagai instrumen perlindungan sosial dan pemberdayaan, dan berubah menjadi sekadar bantuan karitatif yang reaktif dan tidak berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan baru yang belum pernah diungkap meliputi lonjakan penerima 48,5% sebagai pemicu bias data, peran aktif pendamping sebagai faktor pendukung, ketidaksinkronan pusat-daerah, dan rendahnya partisipasi proaktif masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam evaluasi dampak bias data terhadap kesejahteraan sosial berbasis teori Midgley serta transisi kebijakan DTSEN pasca-2025.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya bias data dalam Program Keluarga Harapan di Kota Gorontalo adalah inersia pembaruan berbasis data serta transisi dari DTKS ke DTSEN yang belum optimal, yang menimbulkan *inclusion error* dan *exclusion error*. Adapun faktor penghambat verifikasi dan pemutakhiran data di tingkat kelurahan/kecamatan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis dan infrastruktur, proseedur birokrasi yang rumit dan tidak sinkron, rendahnya partisipasi proaktif masyarakat, serta keterbatasan anggaran operasional.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lokus hanya di Kota Gorontalo sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain, keterbatasan waktu penelitian (24 hari) yang membatasi kedalaman eksplorasi, keterbatasan akses dokumen sekunder karena kebijkan kerahasiaan data, serta keterbatasan pada masa transisi kebijakan DTSEN yang masih baru sehingga dampak jangka panjang belum dapat dievaluasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

berkaitan dengan evaluasi longitudinal setelah DTSEN berjalan satu siklus penuh dengan menggunakan metode campuran (*mixed methods*) agar cakupan informasi lebih luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Gorontalo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alex. (2023). *DTKS Kota Gorontalo Harus Diperbaiki Secara Kontinu*. GOPOS.ID. https://doi.org/10.21107/kompetensi.v16i1.14429

Alnamira, A. B. J. G. (2022). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Kadolomoko*. Lmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Muhammadiyah Buton, 7(2), 172–186. https://doi.org/10.35329/mitzal.v7i2.3652

Arlina, Guntur, M., & Nain, U. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (* Studi Kasus : PKH Bidang Pendidikan). 9(2), 70–80. https://ojs.unm.ac.id/elektikakontemporer/article/view/31655

BPS Kota Gorontalo. 2025. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Gorontalo 2025.

Br sembiring, f. . (2024). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Bantuan Sosial BagiKesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011*. Journal Of Social Science Research, volume 4 n, 6779–6790. https://paperity.org/p/357841210/data-terpadu-kesejahteraan-sosial-terhadap-bantuan-sosial-bagi-kesejahteraan-ekonomi.

C. John. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed

Haliim, W., Hakim, A. I., Studi, P., Politik, I., Brawijaya, U., Malang, K., & Timur, J. (2024). *Ketergantungan Masyarakat Miskin Dan Dilema Kebijakan Sosial : Studi Pada Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*. *7*(2), 97–112. https://doi.org/10.33701/jkp.v7i2.4616

Listy & lham Mirzaya Putra, J. (2024). *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraankeluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun*. *6*(1), 591–606. https://www.researchgate.net/publication/373411280_Dampak_Program_Keluarga_Harapan_PKH_terhadap_Peningkatan_Kesejahteraan_Keluarga_Miskin_di_Kelurahan_Kerasaan_I_Kecamatan_Pematang_Bandar_Kabupaten_Simalungun

Martini, A. (2017). MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Meirien, L., Lieberth, R., & Tanjung, V. M. (2025). *The Effectiveness of Social Assistance on Economic Equity : A Case Study of the Circunomy Movement in Jakarta Studi Kasus Gerakan Circunomy di Jakarta*. *5*(1), 62–86. https://doi.org/10.46362/servire.v5i1.345

Natsir, N., Arsyad, Y., Studi, P., Luar, P., Pendidikan, F. I., & Makassar, U. N. (2025). *Perlindungan Sosial Adaptif Dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial : Studi Kasus Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kota Gorontalo Adaptive Social Protection and Social Assistance Distribution Mechanism : Case Study of Family Hope Program (PKH) in Gor*. *4*(1), 73–84. https://alisyraq.pabki.org/index.php/alihtiram/

Noegroho, A., Adi, T. N., & Parasdya, S. D. (2024). *The Role of Companion Communication in the Cognitive Achievement of Family Members of the Indonesian Conditional Cash Transfer Program in Indonesia*. *22*, 4695–4706. https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.000346

Oktarina, V., Karlina, N., & Candradewini. (2022). *Evaluasi Konteks Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Department of Public Administration ,* Faculty of Social and Political Sciences THIS RESEARCH IS MOTIVATED BY A PHENOMENON WHERE THERE ARE MANY POOR PEOPLE. 14(1). https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41324

Preface: *The 2nd International Conference of Mathematics Education, Learning, and Application.* (2024). *AIP Conference Proceedings*, *3148*(1), 10001. https://doi.org/10.1063/12.0030387

Qoyum, A. (2025). *SOCIAL SECURITIES SCHEME , FINANCIAL INCLUSION , AND ITS IMPACT ON POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA : CASE OF ZAKAT RECIPIENTS*. *26*(2), 690–703. https://doi.org/10.33736/ijbs.8887.2025

Raharjo, M. M., Labolo, M., & Djohan, D. (2022). Sistem dan Administrasi Pemerintahan Daerah: Teori, Regulasi, dan Implementasi. Depok: Rajawali Pers.

Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). *ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KOTA RANTANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK*. *VIII*, 1–10. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237697134

Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif. Alfabeta.

Sri, H., & Rutiana, D. W. (2021). *Social Aid in Online News : Tracking the Issues of Resilient Society*. *37*(3), 317–334. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3703-19

Suaib; Zulhijjah, A. N. (2024). Pembangunan dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. Intelegensia Media.

Syahrial, & Desrina, T. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN)*. *2*(1), 58–74. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63

Tatu Sius, K., Y Palan Peten, Y., Vemmilia Raju, K., L Kaha, H., & Nyong, F. (2024). *Public Trust: Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), *12*(1), 116–125. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.207

Yulianti, T., Apriani, R., Arif, M., & Hakim, B. (2024). *Bentuk-Bentuk Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Indonesia.* Journal of Science and Social Research, 4307(4), 1854–1858. https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/2338/1396